

DINAMIKA KEPENTINGAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE DARI TAHUN 1975 - 1999

Oleh:

Ardli Johan Kusuma

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : ardli.johan@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang alasan Australia yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik “librarian research” dimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet.

Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa Australia telah mengalami pergeseran kepentingan terhadap Timor Leste. Di era tahun 1970-an, Australia memiliki kepentingan keamanan nasional terhadap Timor Leste. Karena ketika itu dianggap komunis sudah masuk Timor Leste, sehingga Australia mendukung Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor Leste dengan alasan keamanan. Kemudian di tahun 1980-an kepentingan nasional Australia terhadap Timor Leste berubah menjadi kepentingan ekonomi. Hal ini ditandai dengan pemberian dukungan terhadap kemerdekaan Timor leste dari Indonesia. Perunahan tersebut dilandasi karena Australia menginginkan legalitas pengolahan sumber daya alam di wilayah Celah Timor tetap terjaga. Karena ketika itu dunia internasional mempermasalahkan keabsahan pendudukan Indoensia atas Timor Leste. Artinya ada kepentingan ekonomi bagi Australia berupa peluang pengolahan minyak dan gas di Celah Timor.

Kata Kunci: Australia, Timor Leste, Keamanan Nasional, Kepentingan Ekonomi, Celah Timor.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 desember 1975, Indonesia mengadakan sebuah operasi yang dikenal dengan operasi seroja, yang bertujuan untuk menginvasi Timor-timur dengan tujuan agar bisa berintegrasi menjadi salah satu wilayah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Operasi invasi ini dilakukan Indonesia dibawah pemerintahan Soeharto setelah adanya klaim dari Indonesia atas Timor-timur melalui Deklarasi Balibo.

Setelah operasi seroja berhasil melumpuhkan pihak-pihak dari Timor-timur yang menolak integrasi, akhirnya Timor-timur resmi menjadi salah satu wilayah dari NKRI. Masuknya Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia sebagai provinsi baru tersebut disahkan melalui pengumuman UU No. 7 Th. 1976 (LN. 1976-36) oleh presiden Soeharto yang menentukan integrasi Timor Lorosae kedalam Indonesia sebagai provinsi ke-27.¹ Selain itu juga lahir PP No. 19 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta dipertegas lagi melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam wilayah Nergara Kesatuan RI.

Disisi yang lain Australia sudah terlibat dalam masalah yang menyangkut Timor Leste sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia melakukan invasi yang dianggap oleh banyak negara termasuk PBB merupakan langkah yang diambil Indonesia merupakan langkah yang ilegal untuk mempersatukan Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia. Namun saat itu Australia menjadi negara yang mendukung langkah yang diambil Indonesia, karena Australia memiliki kepentingan keamanan yang luar biasa. Dengan iklim perang dingin yang mengancam keamanan negara, maka Australia jelas berkepentingan agar Timor Leste ini tidak menjadi sumber instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara. Karena pada waktu itu komunis sudah masuk ke Timor Leste. Sejak awal Australia memahami langkah yang diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu kedalam negara kesatuan RI. Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste tersebut.

Namun ditahun 1990-an, sikap Australia berubah, dengan memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Sikap pemebrian dukungan tersebut semakin jelas ketika Australia dibawah pemerintahan PM John Howard. Australia

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "*Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae*", Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Departemen Penerangan Publik, 2000, hal. 4.

mulai menyatakan bahwa Timor Leste untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya atas Timor Leste dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Timor Leste sebelum merdeka penuh.

Dengan berubahnya kebijakan yang diambil oleh Australia ini jelas menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa kebijakan di tahun 1975 dimana ketika itu Australia memberikan dukungan terhadap Indonesia untuk menginvasi Timor Leste, tiba-tiba berubah di tahun 1998 yang berbalik mendukung Timor Leste menjadi negara yang merdeka dari Indonesia pada tahun 1999.

A.1. Kajian Pustaka

A.1.1. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional dapat diartikan secara minimum sebagai suatu kepentingan untuk kesejahteraan umum, hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*) suatu negara, hak kepentingan ekonomi, hak perlindungan hukum. Dalam arti yang lebih khusus yaitu untuk mempertahankan dan memelihara identitas politik dan kulturalnya. Sehingga agar kepentingan nasionalnya terwujud, suatu negara bisa saja membuat suatu kerja sama atau bahkan konflik sekalipun.

Hans J. Morgenthau menyampaikan pandangan tentang konsep kepentingan nasional sebagai berikut: *“The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances”*.²

Dengan pernyataan tentang konsep kepentingan nasional menurut Morgentau dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepentingan nasional terdiri dari dua elemen, yaitu pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, yang kedua mempertimbangkan atau dipengaruhi berbagai kondisi lingkungan strategi di sekitarnya. Dalam rangka pemenuhan

²Aleksius Jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 67.

kebutuhan sendiri, dapat di peroleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan Integritas wilayah nasional, sisitem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapaun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan adalah dengan menjalangkan kebijakan politik luar negeri.

Dalam konsep kepentingan nasional disebutkan oleh Hans J. Morgenthau bahwa setiap perilaku baik politik maupun non-politik yang berkaitan dengan hubungan internasional baik dengan negara ataupun organisasi internasional pasti ada kepentingan nasional yang melatarbelakangi segala perilaku internasional yang dilakukan oleh negara.

Sehingga dengan menggunakan konsep tersebut dapat dianalisis bahwa perubahan sikap Australia yang semula mendukung Indonesia untuk menginvasi Timor Leste pada tahun 1975, kemudian sikap Australia berubah mendukung Timor Leste untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 1999. Dengan mengacu pada konsep kepentingan nasional tersebut dapat dimaknai bahwa Australia telah mengalami pergeseran kepentingan terhadap Timor Leste. Hal itu ditunjukkan dengan perubahan sikap dari Australia itu sendiri.

A.2. Metode Penulisan

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pembahasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan “Mengapa terjadi perubahan sikap Australia dari yang semula mendukung Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Leste pada tahun 1975, kemudian berubah mendukung Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia pada tahun 1999?”. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi fokus pada penelitian ini.

Tulisan ini bersifat kualitatif. Dimana dalam tulisan ini data-data akan menunjukkan fenomena tentang (keadaan, proses, kejadian dan lain-lain) yang akan dinyatakan dalam bentuk perkataan atau kalimat sehingga akan bisa dipahami dengan baik. sementara jenis tulisan ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yang dimaksud disini, adalah tulisan ini akan mendeskripsikan secara detil tentang fenomena yang terkait objek penelitian yaitu

kepentingan Australia terhadap Timor Leste. Sementara analitis dalam penelitian ini adalah proses analisa menggunakan beberapa konsep terhadap fenomena perubahan sikap yang ditunjukkan Australia dari yang semula mendukung Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Leste, kemudian setelah Indonesia menguasai Timor Leste, tiba-tiba Australia berubah arah mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Adapun mengenai pengumpulan data, penulis mengumpulkan data-data untuk mendukung argumen dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

B.1. Dukungan Australia Atas Invasi Indonesia Terhadap Timor Leste.

Ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan invasi dan memaksa Timor Leste untuk berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1975, posisi Australia ketika itu, dengan dipengaruhi beberapa alasan memberikan dukungan terhadap Indonesia untuk melakukan invasi. Alasan yang paling menonjol bagi Australia terkait dukungannya terhadap Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor Leste ketika itu adalah alasan keamanan nasional Australia.

Diman keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan yang akan menjadi prioritas besar bagi negara untuk mewujudkan keamanan bagi negaranya. Karena rasa aman dibutuhkan oleh semua warga negara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena jika rasa aman tidak didapatkan oleh semua warga atau masyarakat di suatu negara, maka segala kegiatan di negara tersebut akan lumpuh. Baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, politik serta kegiatan pendidikan. Untuk itu masalah keamanan nasional akan mendapatkan perhatian yang besar dari negara.

Persepsi suatu bangsa tentang keamanannya dibentuk oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Selain itu dalam hubungan internasional yang didominasi oleh negara-negara bangsa, sebagai aktor negara-negara bangsa itu bukan saja berindak sebagai subjek, tetapi juga sebagai objek kebijakan negara-negara bangsa lain. Sebab itu, walaupun politik luar negeri sering dikatakan pada dasarnya sebagai lanjutan politik dalam negeri, sampai taraf tertentu politik luar negeri juga merupakan reaksi terhadap politik luar negeri negara-negara lain.³

Sementara itu, realitas yang telah senantiasa menandai hubungan internasional dari jaman ke jaman adalah bahwa ciri hubungan antar bangsa, yang membentuk sistem politik internasional, hampir selalu ditentukan terutama oleh negara-negara besar, bagaimana pun definisinya. Dan dalam hubungan internasional kontemporer, terutama untuk Asia-Pasifik, secara tradisional negara-negara besar itu adalah Amerika Serikat, Russia (pewaris Uni Soviet dalam Perang Dingin), RRC, dan Jepang, sedang India dan Indonesia misalnya, mungkin dapat digolongkan sebagai negara-negara besar potensial untuk masa depan, sekurang-kurangnya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepentingan dan kebijakan negara-negara besar itu menentukan pola hubungan dan interaksi antar negara di kawasan Asia-Pasifik.⁴

Itu artinya kebijakan tentang keamanan Australia di era 1970-an dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu terjadinya ketidakstabilan di banyak kawasan dan negara yang disebabkan oleh terjadinya perang dingin.

Di saat perang dingin berlangsung tepatnya pada tahun 1970-an tentunya negara-negara di Asia tenggara dan juga Australia menginginkan perdamaian dan cenderung ingin menghindari dampak peperangan yang disebabkan perang dingin. Terlebih ketika itu negara-negara di Asia tenggara dan juga Australia berada di tengah ancaman Komunis yang semakin

³ Soedjati Djiwandono, " *Konsep-Konsep Keamanan : Pengalaman Indonesia* ", dalam http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=404&coid=1&caid=34&auid=2 diakses 13 oktober 2012

⁴ *Ibid*

kuat di Vietnam, Laos dan Kamboja sudah tentu memerlukan upaya yang luar biasa agar tujuan tersebut dapat terwujud.⁵

Australia ketika itu merupakan salah satu aliansi dari blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Australia begitu dekat dengan negara barat karena Australia dulunya sebelum tahun 1986 merupakan negara persemakmuran dari Inggris Raya, untuk itu wajar jika Australia begitu dekat dengan negara-negara barat meskipun secara geografis letak Australia lebih dekat dengan Asia. Kedekatan Australia dengan negara-negara barat ini membuat semua kebijakan yang diambil Australia seolah berkiblat pada kepentingan negara-negara barat.

Namun sejak pemilihan pemerintah Whitlam pada 1972 terjadi perubahan pada orientasi politik luar negeri Australia. Gough Whitlam menggunakan jabatan perdana menteri secara penuh. Dia menuntut "antisipasi perubahan cerdas", yang akan mengikuti penerimaan dunia internasional atas Cina pada tahun 1972, penarikan pasukan asing dari Vietnam, dan multipolaritas menggantikan bipolaritas Perang Dingin. Dia mengubah fokus Australia ke Asia.⁶ Sejak itulah kepentingan Australia atas Timor Leste dan Indonesia menjadi prioritas. Di tahun 1970an kepentingan Australia adalah tentang mendapatkan rasa aman dari ancaman yang disebabkan perang dingin. Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timor Leste pertama-tama adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timor Leste pada masa tahun 1970-an itu menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timor Leste stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu.

Australia tidak menginginkan jika terjadi ketidakstabilan pada negara-negara yang dijadikan benteng untuk membendung ancaman perang dari dampak perang dingin yaitu Indonesia dan Timor Leste. Karena jika hal itu terjadi maka berarti Australia membiarkan gerbang menuju peperangan antara pihak Komunis (blok Timor) dan pihak Liberal (blok

⁵ Bambang Cipto, *HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal. 38

⁶ Garry Woodard, "Whitlam turned focus on to Asia", 2005, dalam <http://www.theage.com.au/news/opinion/whitlam-turned-focus-on-to-asia> diakses 11 oktober 2012

barat) terjadi di kawasan yang sangat dekat dengan Australia terutama Timor Leste yang ketika itu sudah terjadi konflik intern. Dan hal itu akan membawa Australia kepada situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena mau tidak mau Australia akan terseret pada peperangan yang terjadi. Terlebih Australia merupakan aliansi dari blok barat yang dipimpin Amerika Serikat yang mengusung anti Komunisme. Dan itu membuat Australia harus menunjukkan eksistensinya dalam memerangi komunisme jika sudah menyebar di kawasan yang dekat dengan Australia.

Dan dapat dilihat dari situasi itu Australia pada tahun 1970an fokus terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keamanan nasional Australia terutama kebijakan yang berkaitan dengan negara tetangganya yang berbatasan langsung yaitu Indonesia dan Timor Leste yang menjadi benteng langsung dari menyebarnya komunis dan melusnya konflik.

B.2. Perubahan Dari Kepentingan Keamanan Nasional Menjadi Kepentingan Ekonomi

Fokus Australia terhadap keamanan nasional pada tahun 1970-an yang berkaitan dengan Timor Leste mulai berkurang dengan keadaan Perang Dingin yang mulai berakhir pada tahun 1980-an ketika Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev meluncurkan program reformasi, perestroika dan glasnost. Secara konstan, Uni Soviet kehilangan kekuatan dan kekuasaannya terhadap Eropa Timur dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1991. Dengan mulai berakhirnya perang dingin menandakan bahwa ancaman peperangan antara negara-negara yang menganut Komunis dan Liberal juga mulai berkurang. Dan tatanan hubungan internasional mulai stabil, begitupun keadaan di kawasan Asia tenggara yang selama perang dingin berlangsung terutama di tahun 1970-an membuat Australia khawatir akan serangan komunis yang sempat berkembang di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Australia.

Dengan mulai stabilnya kawasan Asia membuat fokus Australia terhadap Timor Leste berubah menjadi lebih didominasi kepentingan ekonomi, terlebih pada tahun akhir 1980-an hingga akhir tahun 1990-an dimana isu tentang ladang minyak yang bernilai miliaran dollar Amerika Serikat yang terkandung di laut Timor atau Celah Timor semakin muncul di permukaan.

Celah Timor adalah daerah yang landas kontinen antara Timor Leste dengan Australia, yaitu daerah yang terletak diantara dua titik dasar pada pulau Timor, yaitu di sebelah timur pada titik median line antara pulau Leti (Indonesia) dan pulau Yako (Timor Leste), dan di sebelah barat pada titik mulut sungai Mota Masin di perbatasan Timor Leste dan NTT. Celah Timor (Timor Gap) merupakan wilayah perairan disebelah selatan pulau Timor yang apabila ditarik sebuah garis lurus ke selatan, wilayah ini bergaris lurus dengan wilayah Australia sebelah barat. Posisi Timor Gap sendiri secara faktual berada di 0.8.18 Lintang Selatan dan 125.34 Bujur Timor.⁷

Sejarah Celah Timor muncul ketika Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani Kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. Karena Portugal (sebagai penguasa kolonial Timor Lorosa'e pada saat itu) menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut maka pembuatan batas tidak selesai, dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan "Celah Timor atau Timor Gap".⁸ Dengan demikian Celah Timor ketika itu merupakan wilayah laut yang mempunyai garis batas yang tidak jelas, dengan negara-negara yang ada disekitarnya yaitu Indonesia, Australia, dan Portugal yang ketika itu masih menguasai Timor Leste. Hingga akhirnya pada tahun 1975 Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Leste dan memaksa Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia.

⁷"The Geographic of Timor Gap", <http://www.wikipedia.org>, diakses pada 12 Oktober 2012.

⁸"*Latar Belakang Sejarah Laut Timor* ", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003, hal 2.

Celah Timor sendiri menjadi wilayah yang strategis karena wilayah ini mengandung sumber daya minyak dan gas alam. Celah Timor merupakan salah satu dari enam kawasan yang memiliki cadangan minyak tergolong besar selain Timor Leste wilayah tengah, Venezuela, Mexico, Argentina dan Madagaskar. Kemudian menurut penelitian seismik, dasar laut timor Gap atau Celah Timor diperkirakan mengandung cadangan minyak sekitar 5 miliar barel atau merupakan salah satu ladang minyak terbesar dari 25 ladang minyak terbesar di dunia. disamping itu, Celah Timor juga mengandung endapan gas alam sekitar 5.000 miliar kaki kubik.⁹

Menurunnya tensi perang dingin, serta mulai kondusifnya keamanan di kawasan Asia, ditambah lagi potensi sumber daya alam yang ada di Celah Timor, membuat Australia mengalami pergeseran kepentingan terhadap Timor Leste. yaitu dari yang semula kepentingan keamanan berubah menjadi kepentingan ekonomi, dimana Australia ingin menguasai minyak dan gas di Celah Timor. Dan sejak itu maka kebijakan Australia yang berhubungan dengan Celah Timor (Timor Leste) dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi. Karena ilmu ekonomi sendiri berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*, pengaruh mana meluas pada ilmu politik sebagaimana pengertian pembangunan ekonomi telah mempengaruhi pengertian pembangunan politik. Oleh karena pilihan-pilihan tentang kebijaksanaan yang harus ditempuh seringkali terbatas sekali adanya.¹⁰ Untuk itu keterkaitan yang begitu erat antara ekonomi dan politik, membuat kebijakan yang diambil Australia berubah ketika kepentingan ekonomi menjadi orientasi negara tersebut.

Akhirnya Australia berniat untuk menuntut Indonesia agar segera menyelesaikan perundingan yang dilakukan sejak tahun 1975 tentang status batas Celah Timor, setelah

⁹ Tulus Warsito, "*DIPLOMASI PERBATASAN*", Yogyakarta, LP3M UMY, 2009, hal. 76.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, Jakarta, PT. Gramedia, 1977, hal. 23.

Indonesia menganeksasi Timor Leste dengan dukungan dari Australia. Perundingan tersebut sudah lama tidak terselesaikan karena isu yang berkembang di tahun 1970-an di Australia adalah isu keamanan, sehingga Australia baru bisa menuntut kembali perundingan pada akhir 1980-an yang sebelumnya sempat tertunda tersebut, setelah kondisi internasional cenderung stabil ketika perang dingin mulai berakhir.

Akhirnya pada tahun 1989 Indonesia dan Australia melakukan perjanjian tentang status Celah Timor, karena ketika itu Indonesia yang merupakan penguasa atas Timor Leste mempunyai hak untuk menentukan nasib dari Timor Leste termasuk nasib dari Celah Timor yang merupakan wilayah dari Timor Leste, meski banyak negara menganggap bahwa penguasaan Indonesia atas Timor Leste itu adalah tindakan yang tidak sah. Kemudian perjanjianpun dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dengan kesepakatan untuk melakukan pembagian secara merata atas hasil eksplorasi yang akan dilakukan di Celah Timor oleh Indonesia dan Australia, yang kemudian wilayah yang dieksplorasi oleh Indonesia dan Australia di Celah Timor itu disebut dengan “ Daerah Kerjasama Area A “. Kesepakatan itu disebut-sebut sebagai balas budi Indonesia karena Australia menjadi negara yang mendukung langkah invasi Indonesia ke Timor Leste di tahun 1975.

Dengan berpegangan pada hasil perundingan yang dilakukan Australia dengan Indonesia yang menghasilkan kesepakatan Celah Timor, maka Australia mendapatkan hak yang legal untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi di perairan Celah Timor.

Kemudian Australia dengan menggandeng beberapa perusahaan swasta asal Australia dan beberapa dari luar Australia untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor. Adapun daftar nama titik kilang minyak beserta perusahaan yang beroperasi di Celh Timor adalah:

- 1. Elang-Kakatua.** Ladang ini dieksplorasi oleh perusahaan perminyakan ConocoPhillips dan telah menghasilkan pendapatan sekitar 50 juta dolar AS yang telah dibagi antara Australia dan Indonesia ketika Timor Lorosa'e diduduki oleh Indonesia.
- 2. Bayu-Undan.** Ladang Gas Bayu-Undan sedang dieksplorasi oleh perusahaan minyak ConocoPhillips. produksinya dimulai pada awal tahun 2004.
- 3. Greater Sunrise.** Ladang minyak ini dieksplorasi oleh perusahaan Woodside Australian Energy yang bekerja sama dengan Royal Dutch Shell dan Osaka gas.
- 4. Ladang minyak Laminaria-Corallina.** Ladang minyak ini dieksplorasi oleh Woodside, Shell dan BHP. Ladang ini mulai memproduksi minyak pada akhir tahun 1999.¹¹

Dari daftar ladang minyak serta perusahaan yang beroperasi di Celah Timor, maka kita dapat mengetahui bahwa mayoritas perusahaan yang beroperasi di Celah Timor merupakan perusahaan minyak yang berasal dari Australia. walaupun ada perusahaan dari luar Australia seperti Royal Dutch Shell dan Osaka gas yang beroperasi di ladang minyak Greater Sunrise, maka perusahaan tersebut hanya sebagai pihak yang diajak kerjasama. Namun operasi penuh berada di tangan perusahaan Woodside Australian Energy, yang merupakan perusahaan pertambangan minyak asal Australia. Dengan banyaknya perusahaan pertambangan minyak asal Australia yang beroperasi di Celah Timor semakin mengindikasikan bahwa kepentingan ekonomi Australia untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Celah Timor tidak dapat dipungkiri.

B.3. Australia Mendukung kemerdekaan Timor Leste Dari Kekuasaan Indonesia

Di era tahun 1970-an, Australia memiliki rasa khawatir terhadap keberadaan Timor Leste yang saat itu dianggap sudah terpengaruhi oleh ideologi komunis. Mengingat, saat itu

¹¹ Buletin La'õ Hamutuk, " *Latar Belakang Sejarah Laut Timor* ", Vol. 4, Nos. 3-4 Agustus 2003, hal. 3-4

tengah terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Australia yang merupakan bagian dari sekutu blok barat merasa khawatir terhadap ancaman komunis yang mulai menyebar di Timor Leste. Karena Australia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste. Akhirnya pada tahun 1975 Indonesia berhasil menginvasi Timor Leste dan memasukkan Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia sekaligus memberantas komunis di wilayah tersebut dengan bantuan dan dukungan dari negara-negara barat termasuk Australia.

Namun setelah Indonesia berhasil menduduki Timor Leste sejak tahun 1975, rakyat Timor Leste yang menolak Indonesia tetap berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste. Dan di akhir 1990-an, Australia mengeluarkan sikap untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Disisi yang lain era tahun 1990-an adalah era dimana telah terbukti bahwa di kawasan Timor Leste, tepatnya laut timor, mengandung sumber daya alam berupa minyak dan gas yang melimpah. Lebih khusus lagi di bagian Celah Timor yang ketika secara pengelolaan didominasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asal Australia, berkat kesepakatan Celah Timor antara Australia dan Indonesia yang menguasai Timor Leste.

Namun di tahun-tahun 1990-an Australia merasa cemas tentang legalitas statusnya sebagai pemegang hak yang sah untuk melakukan eksploitasi minyak dan gas di Celah Timor. Karena pada saat itu status kesepakatan Celah Timor yang telah memberikan hak legal terhadap Australia untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor banyak dipertanyakan tentang kelegalitasannya. Terlebih banyak desakan dari dunia Internasional tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste, dan juga tuntutan PBB yang tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste, agar Timor Leste Menjadi negara yang merdeka.

Selain itu pada tahun 1991, Portugal menuntut haknya dengan mengadukan Australia ke pengadilan Internasional, dengan tuduhan bahwa perjanjian atau kesepakatan Celah Timor itu tidak sah dan merugikan bagi Portugal ataupun bagi rakyat Timor Leste secara material.

Dengan tekanan dari yang luar biasa dari dunia Internasional untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, dimana Australia merasa ikut bertanggung jawab atas invasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Timor Leste dimana ketika itu Australia merupakan satu-satunya negara barat yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste. Ditambah lagi Australia juga berkepentingan untuk mengamankan hak legalnya untuk mengeksplorasi minyak dan gas yang ada di Celah Timor, dimana kesepakatan Celah Timor yang dilakukannya dengan Indonesia yang memberikan kelegalan tersebut mulai dipertanyakan di dunia Internasional semanjak tuntutan Portugal di tahun 1991, meskipun mahkamah Internasional tidak menanggapi secara positif tuntutan tersebut.

Dengan alasan-alasan tersebutlah maka Australia memberikan dukungan terhadap Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia dengan harapan setelah Timor Leste merdeka maka Australia bisa melakukan perjanjian ulang dengan Timor Leste mengenai pembagian hasil eksplorasi minyak di Celah Timor yang sebelumnya hak tersebut didapatkan dari perundingan dengan Indonesia yang sekarang dipertanyakan keabsahannya.

Selain kepentingan ekonomi tersebut, ternyata Australia juga mempunyai kepentingan politik dibalik pemberian dukungan terhadap rakyat Timor Leste dari kekuasaan Indonesia. Kepentingan politik tersebut adalah Australia ingin menunjukkan terhadap Indonesia dan dunia bahwa Australia merupakan negara yang patut diperhitungkan dalam kancah politik internasional. Australia ingin menunjukkan bahwa eksistensinya sebagai aliansi Amerika Serikat, mampu menjalankan tugasnya sebagai pengaman di kawasan Asia tenggara.

Sementara itu bentuk dukungan yang dilakukan Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste diantaranya adalah, pertama Menteri John Howard yang terkenal rasis mengirim

surat ke presiden Habibie yang mengusulkan agar Indonesia memberi otonomi ke Timor Timur. Howard bahkan memaparkan bahwa otonomi adalah pelangkahan bagi rakyat setempat yang akan merdeka beberapa tahun kemudian. Surat Howard memuat syarat yang menegaskan bahwa akhir kelaknya jajak pendapat akan terjadi, inilah bagian yang oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai batang tubuh surat itu. Howard ternyata yakin bahwa kebanyakan orang Timor Timur menginginkan kemerdekaan.

Dengan pengiriman surat oleh Howard kepada Habibie yang berisi tentang desakannya agar Indonesia memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste, Howard ingin menunjukkan kepada rakyat Timor Leste bahwa sebenarnya Australia mendukung keinginan rakyat Timor Leste untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapat simpatik dari Timor Leste untuk melancarkan kepentingannya atas minyak dan gas di Celah Timor.

Selain itu Australia juga memberikan dukungan kepada Pemerintahan de facto Fretilin yang pada prinsipnya memberikan akses kepada perwakilan pemberi bantuan untuk pergi ke seluruh wilayah Timor Leste. Dalam prakteknya, perwakilan utama menyediakan bantuan pangan kepada masyarakat, ICRC membatasi kegiatan bantuannya ke wilayah di sekitar Dilli, dengan dukungan yang disediakan ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) dan didistribusikan oleh Fretilin di daerah wilayah kekuasaan mereka. Dengan kata lain dukungan berupa bantuan langsung yang bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari juga diberikan oleh Australia terhadap masyarakat Timor Leste. Dan seharusnya Timor Leste dari awal sudah sadar bahwa dalam memberikan atau menerima bantuan, negara-negara dihadapkan kepada persoalan-persoalan politik dan persoalan-persoalan ekonomi. Sehingga dalam pemberian bantuan suatu negara menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat benar-benar politik.¹² Begitupun dengan apa yang dilakukan Australia. dimana ada

¹² Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, terj. J. Bunardi, Jakarta, Aksara Baru, 1977, hal. 74.

kepentingan-kepentingan baik yang bersifat ekonomi ataupun politik di balik pemberian bantuan terhadap Timor Leste.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Australia mempunyai keinginan menguasai sumber minyak di celah Timor. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timor Leste dan Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Australia.

Dengan segala upaya internasional dan juga usaha-usaha Australia untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste, Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia dan Portugis menandatangani perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyeleggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78,5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro integrasi yang eksis bergabung dengan Indonesia. Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan di Timor Timur. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemeliharaan keamanan di kawasan ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau *International Force in East Timor* (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan internasional, dan menerima tugas ini. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Dengan keputusan MPR Indonesia yang mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia, menandai mulainya kemerdekaan sebuah negara baru yang bernama

Timor Leste yang didapatkan dengan dukungan internasional dan usaha-usaha yang dilakukan negara tetangganya yaitu Australia dengan segala kemampuannya untuk mendesak Jakarta untuk memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste. Dengan kepentingan yang luar biasa terhadap minyak dan gas di Celah Timor yang dibalut dengan alasan kemanusiaan.

C. KESIMPULAN

Telah terjadi perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Australia terkait Timor Leste. Di era 1970-an, Australia yang sangat berkepentingan untuk menjaga kestabilan keamanan nasionalnya dari ancaman komunisme yang dianggap sudah mulai memasuki wilayah Timor Leste yang merupakan negara tetangga Australia, membuat pemerintah Australia memberikan dukungan kepada Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor Leste, dengan harapan Indonesia mampu membendung berkembangnya komunisme di Timur Leste.

Namun kemudian setelah kondisi politik internasional berangsur menjadi stabil ditandai mulai runtuhnya kubu komunisme, maka secara otomatis kepentingan keamanan nasional Australia terhadap Timor Leste memudar. Karena dianggap komunis tidak lagi menjadi ancaman. Ditambah lagi posisi Celah Timor yang semakin menunjukkan fakta bahwa memang ada minyak dan gas yang terkandung di wilayah laut tersebut, maka membuat Australia mengalami pergeseran kepentingan. Mengingat perusahaan minyak asal Australia banyak yang beroperasi di Celah Timor berkat perjanjian Celah Timor antara Australia dan Indonesia ketika masih menduduki Timor Leste. Namun ketika dunia internasional mulai mempertanyakan kedudukan Indonesia di Timor Leste maka posisi legalitas pengolahan sumberdaya alam di Celah Timor yang dilakukan oleh Australiapun terancam pula keabsahannya. Untuk itu akhirnya Australia memilih untuk memberikan dukungan perjuangan kemerdekaan Timor Leste, dengan harapan Australia bisa memperbaharui perjanjian mengenai hak pengolahan SDA di Celah Timor dengan Timor Leste yang dianggap sebagai pemilik yang lebih sah oleh dunia Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Budiardjo, Miriam, “*DASAR-DASAR ILMU POLITIK*”, Jakarta, PT. Gramedia, 1977.
- Buletin La’o Hamutuk, ” *Latar Belakang Sejarah Laut Timor* ”, Vol. 4, Nos. 3-4 Agustus 2003.
- Cipto, Bambang *HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Jemadu, Alekius, “*Politik Global Dalam Teori dan Politik*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Kindleberger, Charles P, “*Ekonomi Internasional*”, terj. J. Bunardi, Jakarta, Aksara Baru, 1977.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, “*Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae*”, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Departemen Penerangan Publik, 2000,
- Warsito, Tulus, “*DIPLOMASI PERBATASAN*”, Yogyakarta, LP3M UMY, 2009.

Sumber Internet dan Berita

- Soedjati Djiwandono,” *Konsep-Konsep Keamanan : Pengalaman Indonesia*”, dalam http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=404&coid=1&caid=34&auid=2 diakses 13 oktober 2012
- Garry Woodard,” *Whitlam turned focus on to Asia*”, 2005, dalam <http://www.theage.com.au/news/opinion/whitlam-turned-focus-on-to-asia> diakses 11 oktober 2012
- “The Geographic of Timor Gap”, <http://www.wikipedia.org>, diakses pada 12 Oktober 2012.